

Efektivitas Lembaga Birokrasi Dan Tingkat Korupsi Terhadap Investasi Pada Enam Negara Asean (Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Dan Thailand) Tahun 2004-2010

Putra Perdana

Purbayu Budi Santosa

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This study aims to look the relationship between effectiveness of the bureaucracy against investment into the corruption variable acts as a moderating variable in the six ASEAN countries: Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand during 2004-2010.

By using Pooled Least Square approach, this study process six variables in the governance indicators, proposed by Daniel Kaufmann, et. al. Pooled least square method with partial regression performed to reduce accuracy of the identified models with multicollinearity among these with corruption variable and investment variable.

The results of this study show a relationship of the degree of openness, the level of political stability, the level of legislation, and the level of corruption control in six ASEAN countries against corruption and show a relationship from corruption with investment.

Keywords : government effectiveness, corruption, investment, ASEAN

PENDAHULUAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan di Bangkok pada tanggal 8 agustus 1967. Diprakarsai oleh lima negara ASEAN, organisasi ini didirikan dengan tujuan awal untuk peningkatan kerjasama negara-negara sekawasan.

Negara-negara ASEAN memiliki karakteristik yang hampir sama. Sembilan dari sepuluh negara ASEAN adalah bekas negara jajahan yang mendapatkan kemerdekaanya setelah perang dunia kedua. Sebagai negara-negara yang baru merdeka pada awalnya sebagian besar negara-negara tersebut mempunyai permasalahan di bidang penyelenggaraan negara.

Banyak negara-negara ASEAN yang memiliki rekor sebagai negara dengan tindak korupsi yang tinggi. Hal ini dilihat dari studi yang dilakukan oleh *Political & Economic Risk Consultancy* pada tahun 2010 yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, setelah Kamboja dan Vietnam, dua negara ASEAN lainnya. Hal ini senada dengan beberapa survei yang menempatkan beberapa negara ASEAN di posisi atas negara dengan tingkat korupsi tinggi, seperti *Transparency International* dan *World Bank*.

Pada tahun 2012, *Transparency International* mencatat Singapura sebagai negara yang memiliki skor CPI tertinggi dengan skor 9,2, disusul Brunei Darussalam 5,2. Malaysia 4,3. Thailand 3,4. Indonesia 3,0. Vietnam 2,9. Filipina 2,6. Laos 2,2. Kamboja 2,1. Myanmar 1,5. Dari data 2012 tersebut dapat dilihat, bahwa hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang memiliki indeks korupsi diatas 5. Artinya adalah, 80 persen negara-negara ASEAN memiliki permasalahan terhadap korupsi.

Namun di sisi lain, banyak ahli ekonomi yang mempertanyakan ekses negatif dari korupsi itu sendiri. Leys (dikutip dari Pierre-Guillaume Méon dan Laurent Weill, 2008) lebih jauh lagi bahkan mempertanyakan apa sebenarnya "problem tentang korupsi". Pernyataan ini didasarkan pada hipotesis yang menyebutkan bahwa korupsi dapat menjadi hal yang menguntungkan pada

negara dunia ketiga dengan cara mengurangi penyimpangan yang disebabkan oleh institusi berkinerja buruk.

Hal senada juga dikatakan oleh Lui (dikutip dari Pierre-Guillaume Méon dan Laurent Weill, 2008) yang menyodorkan sebuah ilustrasi formal dan menunjukkan bahwa korupsi dapat menjadi cara efisien dalam mengurangi biaya waktu dalam mengantri. Ilustrasi ini sangatlah relevan, dimana waktu tunggu pendirian sebuah usaha bagi beberapa orang dianggap sebagai *cost*. Sehingga dengan *grease* dalam jumlah uang tertentu dapat mengurangi biaya waktu dalam proses birokrasi.

Beberapa ahli mengungkapkan dugaan korupsi dapat menguntungkan ke dalam sebuah hipotesis yaitu an *efficient grease hypothesis*, di mana hipotesis ini menyatakan dugaan bahwa korupsi menjadi sebuah akselerator untuk menunjang percepatan birokrasi yang tidak efisien. Merujuk pada Pierre-Guillaume Méon dan Laurent Weill, (2008) yang menyatakan bahwa birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai halangan besar terhadap aktivitas ekonomi dan bahwa "suap" atau uang "pelicin" dapat memperbaiki "*circumvent*".

Kenyataannya, banyak negara dunia ketiga yang mempunyai tingkat efisiensi penyelenggaraan negara yang buruk, hal ini disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien. Kebanyakan negara-negara ASEAN sendiri memiliki tingkat efisiensi birokrasi yang rendah.

Efisiensi birokrasi yang cenderung rendah terbentur oleh kebutuhan untuk melakukan pelayanan publik, sehingga mau tidak mau, orang perorang atau badan hukum yang hendak melakukan hubungan dengan birokrasi, seperti melakukan perijinan atau melakukan investasi di beberapa negara-negara di ASEAN harus membayar suap, gratifikasi, bahkan hingga menyentuh tindak pidana korupsi secara utuh sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi untuk mempercepat proses mekanisme birokrasi suatu urusan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tingkat penyelenggaraan negara yang buruk akan meningkatkan kesempatan dalam penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara. Hal ini akan mengakselerasi tumbuhnya korupsi pada sistem penyelenggaraan tersebut.

Sudah jelas bahwa rendahnya tingkat efektivitas penyelenggaraan negara akan berimbas pada keengganan para investor untuk melakukan investasi pada suatu negara. Namun dengan adanya kemungkinan untuk mempercepat perolehan izin dan proses birokrasi, investor dapat melakukan suap. Pada tindakan suap tersebut, birokrat yang menerimanya terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

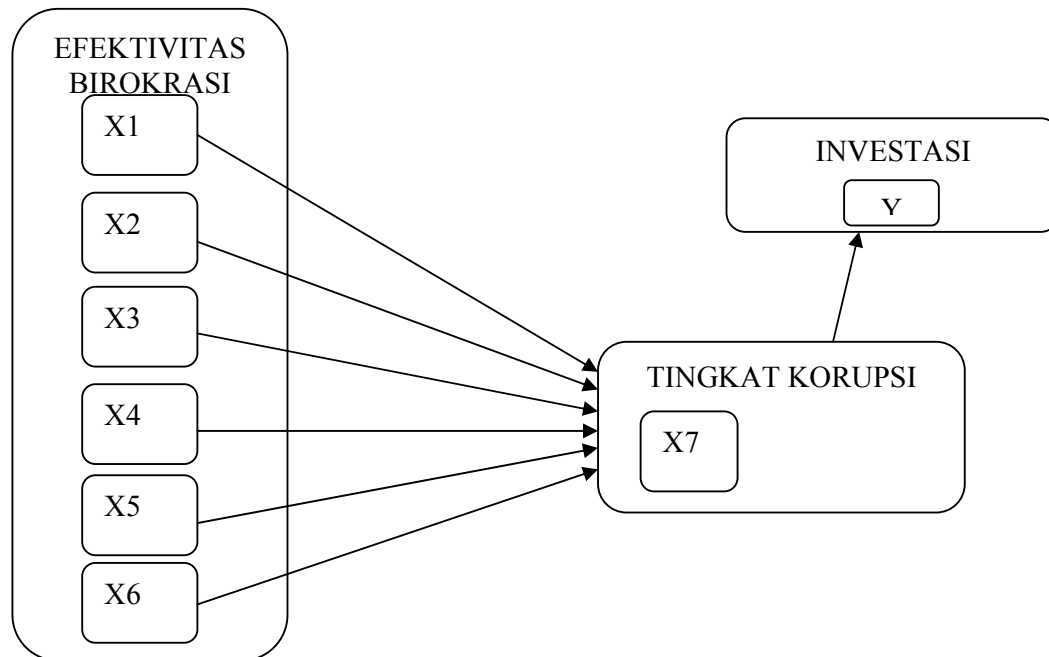
Untuk suatu negara dengan efektivitas birokrasi yang rendah, menyebabkan tingkat korupsi tinggi. Hal ini bisa saja mempengaruhi investasi masuk pada suatu negara. Hal ini juga relevan terutama pada negara-negara berkembang, dimana tingkat efisiensi birokrasi yang rendah selalu diikuti dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hubungan antara efektivitas birokrasi, tingkat korupsi dan investasi dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 2.3 Hubungan Antara Efektivitas Birokrasi, Tingkat Korupsi dan Investasi

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat korupsi, sedangkan tingkat korupsi dipengaruhi efektivitas birokrasi. Ini berarti efektivitas birokrasi mempengaruhi tingkat korupsi, kemudian tingkat korupsi sendiri mempengaruhi tingkat investasi.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat investasi adalah dependen terhadap efektivitas birokrasi dan tingkat korupsi. Hubungan dependen independen antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

- X1 : *Voice and Accountability*
X2 : *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*
X3 : *Government Effectiveness*
X4 : *Regulatory Quality*
X5 : *Rule of Law*
X6 : *Control of Corruption*
X7 : Tingkat korupsi
Y : *Capital net inflow*

Pada penelitian ini, hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut :

- H1 : Diduga *Voice and Accountability* berpengaruh positif terhadap indeks korupsi.
H2 : Diduga *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* berpengaruh positif terhadap index korupsi.
H3 : Diduga *Government Effectiveness* berpengaruh positif terhadap index korupsi.
H4 : Diduga *Regulatory Quality* berpengaruh positif terhadap index korupsi.
H5 : Diduga *Rule of Law* berpengaruh berpengaruh positif terhadap index korupsi.
H6 : Diduga *Control of Corruption* berpengaruh positif terhadap index korupsi.
H7 : Diduga index korupsi berbanding positif terhadap tingkat investasi masuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua model. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{corrupt} = f(\text{voac}, \text{pol}, \text{govec}, \text{requal}, \text{rol}, \text{concor})$$

$$Y = f(\text{corrupt})$$

Dimana secara persamaan, model diatas dikembangkan menjadi :

$$\text{corrupt} = \alpha + (\alpha_1 \text{voac} + \alpha_2 \text{pol} + \alpha_3 \text{govec} + \alpha_4 \text{requal} + \alpha_5 \text{rol} + \alpha_6 \text{concor}) + E_{it}$$

$$Y = \alpha + \text{corrupt} + E_{it}$$

Keterangan :

Y = Capital Net Inflow

Voac = indeks tingkat penduduk negara yang berpartisipasi dalam proses politik, kebebasan berekspresi, kebebasan berkelompok, dan keterbukaan.

Pol = indeks tingkat probabilitas bahwa pemerintahan yang sah akan digulingkan secara inkonstitusional, atau kekerasan, termasuk kekerasan bermotivasi politik maupun terorisme.

Govec = indeks tingkat kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan masyarakat dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan kebijakan dan pelaksanaan, kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

Requal = indeks tingkat kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan yang memungkinkan untuk mempromosikan sektor swasta.

RoL = indeks tingkat keyakinan dan kepatuhan agen penegak hukum melaksanakan aturan, kaitanya dengan kualitas penegakan kontrak, hak milik, polisi dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan.

Concor = indeks tingkat persepsi sejauh mana kekuasaan publik dilaksanakan untuk kepentingan pribadi.

Corrup = indeks perspektif tingkat korupsi pada sektor publik yang dirasakan oleh para pelaku bisnis dan analis negara.

Y = nilai dana/modal yang masuk ke dalam suatu negara, misalnya melalui investasi asing (FDI), pembelian saham, obligasi, atau surat berharga lainnya.

i = *cross section*

t = *timeseries*

α_1 = *intercept benchmark*

E = *error*

Variabel Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran tingkat korupsi, ukuran tingkat kualitas pengelolaan negara, dan data investasi. Data ukuran tingkat korupsi dalam penelitian ini menggunakan data dari *Transperency International*, yaitu *Corruption perception index* (CPI). Sedangkan data ukuran tingkat kualitas pengelolaan negara diambil dari *The Worldwide Governance Indicators project*, dimana indikator ini dibagi menjadi 6 kluster, yaitu *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption*. Untuk data tingkat Investasi, data diambil dari *World Bank*, disajikan secara runtut waktu dari 6 negara objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Indeks Perspektif Korupsi (IPK) yang diambil dari *Transperency International*. sedangkan untuk data tingkat kualitas pengelolaan negara diambil dari *The Worldwide Governance Indicators project*. Index perspektif korupsi (IPK) berkisar antara 0 hingga sepuluh, dimana

0 mewakili nilai dengan tingkat korupsi tertinggi dan semakin tinggi nilainya maka semakin bersih negara tersebut dalam hal korupsi.

Sedangkan data tingkat kualitas pengelolaan negara diambil dari *The Worldwide Governance Indicators project*, dimana nilainya antara -2,5 hingga 2,5. angka -2,5 menginterpretasikan bahwa pengelolaan negara dalam kluster tersebut buruk, dan sebaliknya, nilai tertinggi 2,5 menginterpretasikan bahwa pengelolaan negara dalam kluster tersebut sudah baik.

Kaufman (1999) membagi *Governance Indicators* ke dalam 6 kluster, yaitu *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption*. Dimana *Voice and Accountability* mengukur seberapa besar warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan bagaimana keterbukaan pemerintah. *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* mengukur persepsi kemungkinan pemerintah akan terguncang melalui cara inkonstitusional, semisal dengan jalan kudeta atau dengan cara kekerasan.

Lebih lanjut, Kaufman (1999) menyatakan bahwa *Regulatory Quality* maksudnya adalah melihat seberapa baik peraturan (*regulation*) suatu negara dan kualitas dari administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan tersebut. Kemudian, untuk kluster *rule of law* ini menjelaskan sampai sejauh mana masyarakat percaya dan mematuhi hukum yang berlaku. Terakhir, *Control of Corruption* mencerminkan persepsi sejauh mana kekuasaan publik dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, termasuk bentuk-bentuk korupsi secara kecil maupun besar, serta pemanfaatan negara oleh para elite dan kepentingan swasta.

Untuk nilai investasi, data yang diambil dari *World Bank*. Data yang digunakan adalah data *Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$)*. Data ini merupakan catatan dana/modal yang masuk ke dalam suatu negara (dicatat sebagai kredit), misalnya melalui investasi asing (FDI), pembelian saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. *Capital inflow* yang berkontribusi baik bagi perekonomian adalah yang dalam jangka panjang, misalnya melalui investasi modal riil (FDI) berupa pembangunan pabrik, pembelian mesin baru, dls. Sedangkan *capital inflow* jangka pendek sering juga disebut "*hot money*", merupakan dana yang hanya singgah sebentar di suatu negara dan tidak berkontribusi langsung ke peningkatan output (GDP). *Hot money* biasanya hanya mencari keuntungan jangka pendek, misalnya dari pembelian saham.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier. Namun sebelumnya akan terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik.

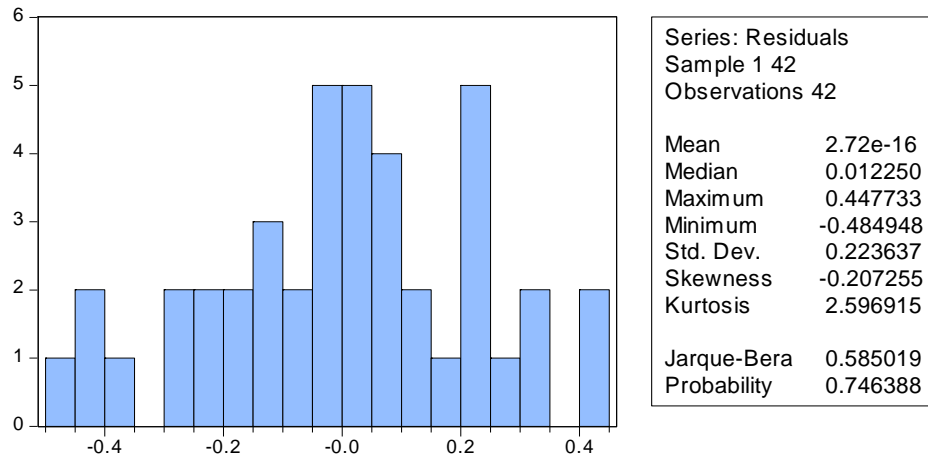
Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.

1. Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam model regresi linier adalah distribusi probabilitas gangguan μ_i memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varians yang konstan. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, dilakukan Uji Jarque-Bera. Hasil Uji J-B *Test* dapat dilihat pada Gambar berikut.

Uji Normalitas



Hasil penelitian menunjukkan nilai Jarque Bera sebesar 0,585 dengan signifikansi sebesar 0,746. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi memiliki residual yang berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas data terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinieritas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi.

Untuk mengetahui variabel-variabel yang berkolinierisasi harus dihitung nilai-nilai statistik R yang berkaitan dengan himpunan variabel bebas masing-masing. Dari hasil perhitungan nilai R model parsial yang lebih rendah dari model utama maka tidak ada masalah multikolinieritas. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
X1	1.0000	0.1603	0.6160	0.7451	0.5515	0.4910
X2	0.1603	1.0000	0.8290	0.7103	0.8679	0.8841
X3	0.6160	0.8290	1.0000	0.9735	0.9885	0.9569
X4	0.7451	0.7103	0.9735	1.0000	0.9571	0.9243
X5	0.5515	0.8679	0.9885	0.9571	1.0000	0.9777
X6	0.4910	0.8841	0.9569	0.9243	0.9777	1.0000

Hasil dari uji multikolinieritas menunjukkan bahwa banyak nilai R yang besar (diatas 0,90), sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah ada multikolinieritas dalam model tersebut. Model alternatif yang harus dilakukan adalah dengan menguji masing-masing persamaan dengan regresi sederhana.

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji White. Hasil pengujian serial heteroskedastisitas menunjukkan hasil sebagai berikut :

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.668573	Prob. F(27,14)	0.8209
Obs*R-squared	23.65450	Prob. Chi-Square(27)	0.6494
Scaled explained SS	13.11605	Prob. Chi-Square(27)	0.9885

Hasil dari uji White Test menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared sebesar 23,654 dengan probabilitas sebesar 0.649. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak ada heteroskedastisitas di dalam model tersebut.

4. Uji Autokorelasi

Karena data penelitian menggunakan data time series, maka uji autokorelasi harus dilakukan. Untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *serial correlation LM test*. Hasil pengujian serial correlation LM test menunjukkan hasil sebagai berikut :

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.774060	Prob. F(2,33)	0.0770
Obs*R-squared	6.044940	Prob. Chi-Square(2)	0.0487

Hasil dari uji LM Test menunjukkan bahwa nilai F sebesar 2,774 dengan probabilitas sebesar 0.077. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak adanya autokorelasi di dalam model.

Pengujian Hipotesis

Goodness of fit test (R²)

Dari hasil regresi yang dilakukan terlihat bahwa nilai R-squared sebesar 0.7205 artinya bahwa sebesar 72 persen variabel terikat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas, sedangkan 28 persen lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. Dari nilai R-squared yang ada terlihat bahwa ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Artinya model dalam penelitian ini dapat dipergunakan.

Uji Regresi

Dependent Variable: X7?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/10/12 Time: 21:17
Sample: 2004 2010
Included observations: 7

Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced)
 observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.49E+10	2.21E+10	-2.490360	0.0168
VA	-3.50E+09	3.26E+09	-1.073303	0.2893
PS	1.00E+10	3.50E+09	2.870160	0.0064
GE	-2.70E+09	5.15E+09	-0.524208	0.6029
RQ	6.32E+09	4.73E+09	1.337355	0.1883
RL	-4.36E+09	3.68E+09	-1.186734	0.2420
CC	6.27E+09	3.82E+09	1.642376	0.1080

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.720420	Mean dependent var	6.69E+09
Adjusted R-squared	0.647197	S.D. dependent var	8.41E+09
S.E. of regression	4.99E+09	Akaike info criterion	47.69439
Sum squared resid	1.05E+21	Schwarz criterion	48.13639
Log likelihood	-1275.748	Hannan-Quinn criter.	47.86485
F-statistic	9.838690	Durbin-Watson stat	2.160575
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Pada penelitian ini, hasil pengujian Uji F menunjukkan bahwa nilai F-statistik adalah sebesar 9,838690 dan lebih besar dari F tabel yaitu 2,29. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, bahwa variabel independen x1 dan x6 secara bersama-sama mempengaruhi variabel x7 secara signifikan. Artinya, variabel *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* secara bersama-sama mempengaruhi *Corruption Perception Index*.

Uji T (Uji Signifikansi Parameter)

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program Eviews 6.0. Untuk menentukan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung di gunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut :

Hasil Regresi

Hubungan	Koef	T	Sig	Keterangan
X1 -> X7	0.2074	1.9446	0.0599	H1 diterima
X2 -> X7	0.7154	5.5145	0.0000	H2 diterima
X3 -> X7	0.2437	1.4169	0.1653	H3 ditolak
X4 -> X7	0.4282	2.4149	0.0211	H4 diterima
X5 -> X7	0.3255	1.6247	0.1132	H5 ditolak

X6 -> X7	0.3411	2.2695	0.0295	H6 diterima
X7 -> Y	0.4859	3.517282	0.0012	H7 diterima

Diperoleh bahwa semua paramater yang diuji memiliki arah koefisien positif. Pengujian selanjutnya diperoleh sebagai berikut :

1. Dari hasil estimasi pengaruh variabel X1 terhadap X7 diperoleh nilai $t = 1,9446$ dengan probabilitas sebesar 0,0699. Nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,10, berarti bahwa variabel *Voice and Accountability* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Corruption Perception Index* (Indeks Perspektif Korupsi). Dengan demikian H1 diterima.
2. Dari hasil estimasi pengaruh variabel X2 terhadap X7 diperoleh nilai $t = 5,5145$ dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,05, berarti bahwa variabel *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Corruption Perception Index* (Indeks Perspektif Korupsi). Dengan demikian H2 diterima.
3. Dari hasil estimasi pengaruh variabel X3 terhadap X7 diperoleh nilai $t = 1,4619$ dengan probabilitas sebesar 0,1653. Nilai signifikansi t yang lebih besar dari 0,05, berarti bahwa variabel *Government Effectiveness* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Corruption Perception Index* (Indeks Perspektif Korupsi). Dengan demikian H3 ditolak.
4. Dari hasil estimasi pengaruh variabel X4 terhadap X7 diperoleh nilai $t = 2,4149$ dengan probabilitas sebesar 0,0211. Nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,05, berarti bahwa variabel *Regulatory Quality* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Corruption Perception Index* (Indeks Perspektif Korupsi). Dengan demikian H4 diterima.
5. Dari hasil estimasi pengaruh variabel X5 terhadap X7 diperoleh nilai $t = 1,6247$ dengan probabilitas sebesar 0,1132. Nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,05, berarti bahwa variabel *Rule of Law* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Corruption Perception Index* (Indeks Perspektif Korupsi). Dengan demikian H5 ditolak.
6. Dari hasil estimasi pengaruh variabel X6 terhadap X7 diperoleh nilai $t = 2,2695$ dengan probabilitas sebesar 0,0295. Nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 0,05, berarti bahwa variabel *Control of Corruption* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Corruption Perception Index* (Indeks Perspektif Korupsi). Dengan demikian H6 diterima.
7. Dari hasil estimasi pengaruh variabel X7 terhadap Y diperoleh nilai $t = 3.517282$ dengan probabilitas sebesar 0.0012 Nilai signifikansi t yang lebih besar dari 0,05, berarti bahwa variabel *Corruption Perception Index* (Indeks Perspektif Korupsi) berpengaruh signifikan terhadap capital net inflow. Dengan demikian H7 diterima.

KESIMPULAN

Dari penjabaran diatas terlihat bahwa ternyata proses terbentuknya korupsi dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan suatu negara, stabilitas politik, perundang-undangan dan tingkat kontrol pemerintah dalam tindak pidana korupsi. Hal-hal tersebut dapat memicu adanya tindakan korupsi didalam birokrasi suatu negara.

Korupsi itu sendiri kemudian berpengaruh signifikan terhadap dana/modal yang masuk ke dalam suatu negara (*Foregin Direct Investment*/FDI). Hal ini tentu saja dapat merugikan karena tidak lancarnya FDI yang masuk akan menghambat proses pembangunan di negara-negara ASEAN yang sebagian besar masih merupakan negara berkembang.

REFERENSI

- Afadlal, Mariana A.F, Inayati R.S, Sungkar Y, Akbar R.T.2011 *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama*. P2P-LIPI . Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Axel Dreher, Christos Kotsogiannis and Steve McCorriston. 2004. *CORRUPTION AROUND THE WORLD: EVIDENCE FROM A STRUCTURAL MODEL*. Department of Economics, School of Business and Economics, University of Exeter, Streatham Court, Rennes Drive, Exeter EX4 4PU, England, UK.
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data 3rd Edition*. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.
- Case, Karl. Fair, Ray. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Terjemahan. Erlangga: Jakarta.
- Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi (2010). "The Worldwide Governance Indicators : A Summary of Methodology, Data and Analytical Issues". World Bank Policy Research Working Paper No. 5430 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130
- Fred N. Kerlinger. 1995. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h 30
- F.X Sugiyanto. 2011. *Korupsi dan Kemiskinan*. Disajikan Pada sesi Perkuliahan mata kuliah Ekonomi Pembangunan II
- Golafshani, Nahid. 2003 *Memahami Reliabilitas Dan Validitas Dalam Penelitian Kualitatif*. Qualitative Report Volume 8 No 4 December 2003 h 597-60
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics Fourth Edition*, McGraw Hill International Editions Compnies Inc. New York.
- Haryono, Siswoyo Prof. Dr. H. (2010). **Solusi Klb Per-Korupsi-An Di Indonesia, UTP Palembang, n.p** <http://danu-punky-w.blog.ugm.ac.id/2012/03/14/solusi/> **diakses 8 Desember 2011**
- Hidayati, Rahmatul (2001) . *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Masa Kolonial sampai Era Reformasi"*, *Dinamika Hukum Universitas Islam Malang* : 7 (13) 2001, 20 -25.
- Imam Ghozali. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Jakarta: Bina Akasara
- Indrayana, Denny (2007). Makalah Seminar : *Manajemen Penanggulangan dan Pengawasan Korupsi di Indonesia*. Paper disajikan dalam Seminar Program Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang
- Islamy, Muh.Irfan, 1998, *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya.

- Jeanet Bentzen. 2005. *Corrupt Africa - implications for growth*. Department of Economics, University of Copenhagen
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006 *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001 *Ekonomi Publik* Edition, Ed. 3. BPFE Yogyakarta.
- Nugroho, SBM. 2009. *Korupsi Hambat Investasi* Rubrik Wacana Harian Suara Merdeka Semarang. Diakses Dari [Http://Nugroho-Sbm.Blogspot.Com/2009/12/Korupsi-Hambat-Investasi.Html](http://Nugroho-Sbm.Blogspot.Com/2009/12/Korupsi-Hambat-Investasi.Html) Pada Tanggal 2 Februari 2012
- , 2009. *Mengapa Menentang Korupsi*. Diakses Dari <http://nugroho-sbm.blogspot.com/2009/12/mengapa-menentang-korupsi.html> pada tanggal 2 Februari 2012.
- Pierre-Guillaume Meon, Laurent Weill. 2008. *Is Corruption an Efficient Grease?*. *Faculte des Sciences Economiques et de gestion, Institut d'Etudes Politiques. Strasbourg*.
- Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional*. Terjemahan. Erlangga: Jakarta.
- Siswoyo, H. *Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan Efektif Dan Efisien Kepada Masyarakat*. Diakses dari <http://siswoyo22.wordpress.com/2008/02/12/reformasi-birokrasi-menuju-pelayanan-efektif-dan-efisien-kepada-masyarakat/> pada tanggal 2 maret 2012
- , *Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan Efektif Dan Efisien Kepada Masyarakat*. Diakses dari <http://siswoyo22.wordpress.com/2008/02/20/reformasi-birokrasi-menuju-pelayanan-efektif-dan-efisien-kepada-masyarakat-lanjutan/>
- Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makroekonomi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Suryono, Agus, 2002 *Pentingnya Manajemen Birokrasi Profesional Untuk Mengatasi Kemunduran Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Sutherland, Heather, 1983, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokasi*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Syah, Thomas Budiman. 2005 *Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia tahun 1983-2003. Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2001, *Birokrasi dalam Polemik*, Saiful Arif (editor), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael P. & Stephen C.Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi* edisi Kesembilan. Jakarta : Erlangga.
- Winarno, Wing Wahyu, 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* : Edisi Kedua. Yogyakarta.
- Yustika, Ahmad Erani, Ph.D. 2009. *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta